

Bupati H Muh Adios Perjuangkan Sekolah Rakyat ke Kemensos untuk Putus Kemiskinan Buton Selatan



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial sebagai salah satu strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Usulan itu disampaikan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios dalam audiensi bersama Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia dan jaja-

ran Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Pemkab Buton Selatan menyatakan siap mendukung program tersebut sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan persoalan yang hendak diatasi masih cukup besar. Tingkat kemiskinan di Buton Selatan tercatat 13,64 persen, sementara Rata-rata Lama Sekolah baru mencapai 7,80 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan ekonomi masih menjadi salah

Lanjut ke Hal: 7

HEADLINE NEWS

JADI IRUP UPACARA HUT KE-81 RI, WALI KOTA BAUBAU H YUSRAN FAHIM AJAK WARGA ISI KEMERDEKAAN DENGAN KERJA NYATA



81TH
BERSATU BERDAULAT
RAKYAT SEJAHTERA
INDONESIA MAJU
17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2026

- Upacara HUT ke-81 RI berlangsung khidmat di Lapangan Lembah Hijau
- Peringatan kemerdekaan jadi pengingat jasa para pahlawan
- Pembangunan Baubau butuh kerja bersama, bukan hanya slogan
- Yusran Fahim: Ayo buktikan Baubau pasti bisa maju!

Laporan: Ardi,
Baubau
Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Lembah Hijau, Kota Baubau, Senin (17/8/2026), menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengenang jasa para pejuang sekaligus memperkuat komitmen membangun daerah. Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, menilai kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata agar pembangunan memberi manfaat semakin luas bagi masyarakat.

Yusran mengatakan keberhasilan pelaksanaan upacara yang berlangsung khidmat tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Menurut dia, peringatan kemerdekaan harus menghidupkan kembali kesadaran bahwa kemajuan yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan dan

Lanjut ke Hal: 7

Tekan Pengangguran, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Buka Peluang Kerja Legal ke Luar Negeri



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan membuka registrasi Program Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai strategi memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat usia produktif sekaligus me-

Lanjut ke Hal: 7

Lima WBP Berpeluang Bebas, Lapas Baubau Usulkan Remisi 317 Orang DI HUT RI ke 81



Kepala Lapas Kelas IIA Baubau Abdul Waris

dul Waris mengatakan, remisi hanya dapat diberikan kepada WBP yang telah berstatus narapidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta telah menjalani pidana sekurang-kurangnya enam bulan. "Yang bisa mendapatkan remisi itu sudah inkrah, sudah ada putusan pengadilan dan berstatus narapidana. Kemudian sudah menjalani hukuman selama enam bulan," kata Abdul Waris, Selasa (11/8/2026).

Lapas Kelas IIA Baubau saat ini dihuni 515 WBP. Namun, status sebagai penghuni lapas tidak otomatis membuat seluruhnya berhak memperoleh remisi. WBP yang masih berstatus tahanan, belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, atau

Lanjut ke Hal: 7

PASPORIA Digelar di Hari Minggu, Imigrasi Baubau Layani 28 Warga Yang Berkunjung di Lippo Plaza Baubau

Laporan: Firman

BAUBAU, BP- "Sebanyak 28 warga memanfaatkan layanan paspor pada hari libur melalui program Pelayanan Paspor Minggu Ceria (PASPORIA) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau di Lippo Plaza Buton, Minggu (9/8/2026). Layanan jemput bola tersebut menjadi bagian dari kampanye Imigrasi untuk Rakyat seka-



ligus rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari 28 permohonan yang diterima, sebanyak 23 merupakan permohonan paspor baru dan lima lainnya penggantian paspor. Pemohon datang dengan berbagai kebutuhan perjalanan, antara lain untuk umrah, wisata, serta persiapan keberangkatan ibadah

Lanjut ke Hal: 7

Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Lima Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Baubau berpeluang mengakhiri masa pidananya bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Mereka merupakan bagian dari 317 WBP yang sementara diusulkan

memperoleh remisi kemerdekaan.

Dari lima WBP tersebut, empat orang berpeluang mendapatkan pembebasan bersyarat setelah memperoleh remisi, sedangkan satu lainnya dijadwalkan bebas murni. Kendati demikian, daftar penerima remisi masih dalam proses finalisasi sehingga jumlah tersebut belum menjadi angka definitif.

Kepala Lapas Kelas IIA Baubau Ab-

Jadi Irup Upacara HUT ke-81 RI, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Ajak Warga Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

pengorbanan generasi terdahulu.

“Ini hikmat untuk kita semua. Dengan adanya upacara ini, kita bisa mengenang bahwa sudah 81 tahun Indonesia merdeka,” ujar Yusran se usai pelaksanaan upacara.

Ia menuturkan, perjalanan Indonesia selama lebih dari delapan dekade telah memperlihatkan berbagai kemajuan, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kehidupan masyarakat. Karena itu, capaian tersebut perlu dilanjutkan melalui kerja bersama yang terarah dan berkelanjutan.

Secara historis, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta melalui pembacaan Proklamasi oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Setelah melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia kemudian memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949. Indonesia juga diterima sebagai anggota Perserika-

tan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1950, menandai semakin kuatnya posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.

Memasuki usia kemerdekaan ke-81, Yusran mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, komunitas, serta seluruh elemen sosial dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan Kota Baubau bergerak menuju kondisi yang lebih maju dan sejahtera.

“Harapan saya sebagai kepala daerah, mari kita bekerja bersama untuk membangun Kota Baubau. Ini jangan hanya jadi slogan saja. Ayo kita buktikan bahwa Baubau pasti bisa maju,” tuturnya.

Yusran juga menyampaikan rasa syukur karena seluruh

rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Baubau dapat berlangsung dengan baik dan sesuai harapan. “Alhamdulillah, dengan pelaksanaan tadi yang begitu khidmat, begitu baik, apa yang kita harapkan dalam pelaksanaan ini bisa terjadi,” katanya.

Menurut dia, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam bentuk kedisiplinan, kerja keras, kebersamaan, dan kontribusi nyata bagi daerah. Dengan semangat tersebut, peringatan HUT ke-81 RI diharapkan tidak sekadar mengenang masa lalu, tetapi menjadi titik tolak memperkuat tekad bersama membawa Baubau semakin maju, sejahtera, dan bermartabat.(*)

Tekan Pengangguran, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Buka Peluang Kerja Legal ke Luar Negeri

nekan pengangguran di daerah.

Program melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Buton Selatan itu menyasar warga setempat yang belum memiliki pekerjaan. Peserta yang lolos seleksi akan memperoleh pelatihan secara gratis sesuai bidang yang disiapkan untuk kebutuhan penempatan kerja di luar negeri.

Kepala Disnakertrans Buton Selatan Muhammad Thahir, S.Pd., MM., mengatakan registrasi dilakukan secara daring melalui tautan yang akan diumumkan pihaknya melalui berbagai media. Pendaftaran hanya diperuntukkan bagi warga Kabupaten Buton Selatan, sedangkan proses seleksi dilakukan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Bupati Buton Selatan untuk mengurangi angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Kami mengajak masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan untuk memanfaatkan kesempatan ini,” kata Muhammad Thahir kepada Baubau

Post, Kamis (6/8/2026).

Calon PMI yang dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan Welder, Barista, Spa Therapist, Waiter/Waitress, Caregiver, dan Plantation Worker. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan serta sertifikasi Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin. Lulusan keperawatan dengan STR aktif dapat mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan penempatan.

Program tersebut menempatkan keterampilan sebagai pintu masuk menuju pasar kerja internasional. Secara historis, migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah menjadi bagian penting dari mobilitas tenaga kerja nasional selama beberapa dekade, sementara di tingkat global migrasi pekerja terus berkembang seiring kebutuhan tenaga kerja lintas negara. Karena itu, keterampilan, sertifikasi, dan jalur penempatan resmi menjadi faktor penting untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran.

Muhammad Thahir men-

gatakan kuota peserta dari BP3MI Sulawesi Tenggara belum diumumkan secara resmi. Namun, registrasi dibuka lebih awal agar calon peserta dapat masuk dalam basis data seleksi dan mengikuti tahapan berikutnya sesuai ketentuan.

“Seluruh pelatihan gratis. Ini kesempatan bagi generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri secara legal. Program ini difasilitasi pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap praktik penempatan tenaga kerja ilegal,” ujarnya.

Seluruh proses rekrutmen dilaksanakan melalui mekanisme resmi pemerintah bersama BP3MI Sulawesi Tenggara. Pemkab Buton Selatan berharap skema tersebut tidak hanya membuka akses pekerjaan bagi warga, tetapi juga memastikan calon PMI memperoleh keterampilan dan perlindungan hukum sebelum ditempatkan di luar negeri.(*)

Bupati H Muh Adios Perjuangkan Sekolah Rakyat ke Kemensos untuk Putus Kemiskinan Buton Selatan

tantangan dalam meningkatkan keberlanjutan pendidikan masyarakat.

“Kami ingin memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak tidak boleh kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi,” kata Adios.

Program Sekolah Rakyat dinilai relevan karena memberikan pendidikan berasrama secara gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin. Selain pembelajaran akademik, konsep tersebut mencakup pembinaan karakter, pemenuhan gizi, dan pengembangan keterampilan sehingga peserta didik diharapkan memiliki bekal untuk melanjutkan pendidikan serta memasuki dunia kerja.

Untuk mendukung pembangunan sekolah, Pemkab Buton Selatan siap menyediakan lahan yang bersih dan bebas sengketa. Pemerintah daerah juga akan melakukan validasi calon peserta didik secara objektif dan transparan agar penerima manfaat sesuai dengan sasaran program.

Dukungan tidak berhenti pada penyediaan lahan. Pemerintah

daerah akan mengerahkan organisasi perangkat daerah untuk menyiapkan akses jalan, air bersih, jaringan listrik, serta layanan jaminan kesehatan bagi para siswa. Langkah itu disiapkan agar penyelenggaraan pendidikan berasrama dapat berjalan secara terpadu.

“Kami siap mengawal program ini dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Sekolah Rakyat menjadi jembatan penting untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Buton Selatan,” ujar Adios.

Upaya tersebut sejalan dengan pengalaman pembangunan pendidikan di berbagai negara. Secara historis, perluasan pendidikan dasar dan menengah menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di banyak negara sejak abad ke-20. Di Indonesia, perluasan akses pendidikan juga mendapat landasan kuat melalui amanat UUD 1945 serta program wajib belajar yang terus dikembangkan pemerintah. Pemkab Buton Selatan berharap pendekatan serupa melalui Sekolah Rakyat dapat memperkecil kesenjangan pendidikan dan membuka mobilitas sosial bagi keluarga miskin.(*)

PASPORIA Digelar di Hari Minggu, Imigrasi Baubau Layani 28 Warga Yang Berkunjung di Lippo Plaza Baubau

haji. Sebelum pelaksanaan, Imigrasi Baubau telah melakukan sosialisasi melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat.

Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau, Febrian Noor Iqtifar, S.Kom., M.A.P., mengatakan PASPORIA dirancang untuk menjawab kebutuhan warga yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Pelayanan pada Minggu memungkinkan masyarakat mengurus dokumen perjalanan tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau aktivitas rutinnya.

“PASPORIA ini merupakan wujud nyata kampanye Imigrasi untuk Rakyat. Kami hadir langsung di ruang publik dan tempat-tempat yang ramai agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan,” kata Febrian saat ditemui di Kantor Imigrasi Baubau, Senin (10/8/2026).

Menurut Febrian, pelayanan tidak ditujukan untuk mengejar jumlah pemohon. Fokus utama program adalah memperluas akses dan memperkenalkan berbagai layanan keimigrasian kepada masyarakat. Selain permohonan paspor, petugas juga memberikan informasi mengenai layanan keimigrasian lainnya.

Rangkaian pelayanan dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen, dilanjutkan entri data, perekaman biometrik, dan pengambilan foto. Setelah seluruh tahapan selesai serta pembayaran dilakukan, paspor dapat diam-

bil sesuai prosedur layanan, sekitar empat hari kerja.

“Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Sebelum kegiatan berlangsung, Imigrasi Baubau bersama pihak penyelenggara telah melakukan sosialisasi melalui media sosial Imigrasi,” ujar Febrian. Ia menilai pemilihan hari Minggu menjadi salah satu faktor yang membuat layanan tersebut lebih mudah dimanfaatkan masyarakat.

Pelayanan paspor di luar kantor merupakan bagian dari perkembangan layanan keimigrasian yang semakin menekankan kemudahan akses. Secara historis, paspor modern berkembang dari kebutuhan negara mengidentifikasi dan mengatur perjalanan lintas batas. Secara internasional, sistem paspor dan dokumen perjalanan semakin terstandar setelah Perang Dunia I, antara lain melalui konferensi internasional tentang paspor dan formalitas kepabeanaan pada 1920. Di Indonesia, pengelolaan keimigrasian kemudian berkembang sebagai bagian dari administrasi negara, termasuk pelayanan dokumen perjalanan bagi warga negara Indonesia.

Febrian berharap PASPORIA dapat menjadi sarana pelayanan yang lebih fleksibel dan relevan dengan mobilitas masyarakat. “Harapan kami, masyarakat merasa terbantu. Imigrasi bisa hadir lebih dekat dan masyarakat dapat mengakses layanan keimigrasian dengan lebih mudah,” katanya. PASPORIA merupakan program nasional Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperluas akses pelayanan publik di bidang keimigrasian sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.(*)

Lima WBP Berpeluang Bebas, Lapas Baubau Usulkan Remisi 317 Orang DI HUT RI ke 81

melakukan pelanggaran tata tertib tidak dapat langsung diusulkan menerima pengurangan masa pidana.

Berdasarkan data sementara, remisi yang diajukan memiliki rentang satu hingga enam bulan. Rinciannya, 75 WBP diusulkan memperoleh remisi satu bulan, 61 orang dua bulan, 83 orang tiga bulan, 45 orang empat bulan, 35 orang lima bulan, dan 15 orang enam bulan. Data tersebut masih dapat berubah mengikuti hasil verifikasi dan proses administrasi.

Persoalan disiplin turut menjadi perhatian dalam pengusulan remisi. Sebanyak 20 WBP saat ini ditempatkan di sel pengasingan atau Strapsel karena melakukan pelanggaran tata tertib. Mereka tidak serta-merta dapat kembali memperoleh hak remisi setelah

menjalani sanksi.

“Kalau melanggar tata tertib, ada masa satu tahun berjalan. Setelah itu baru bisa diusulkan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk remisi,” ujar Abdul. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian remisi berkaitan dengan proses pembinaan dan kepatuhan WBP terhadap tata tertib selama menjalani pidana.

Dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia, pemberian remisi merupakan bagian dari sistem pembinaan narapidana. Istilah pemasyarakatan secara resmi menggantikan pendekatan kepenjaraan setelah lahirnya gagasan pemasyarakatan pada 1964, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No-

mor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara internasional, pengurangan masa pidana dan insentif bagi perilaku baik juga dikenal dalam berbagai sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Lapas Kelas IIA Baubau masih menunggu finalisasi sebelum daftar penerima remisi HUT ke-81 RI ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan demikian, 317 WBP tersebut masih berstatus sebagai penerima yang diusulkan, sementara lima WBP yang berpeluang bebas menunggu kepastian hasil penetapan resmi. (*)

KUA-PPAS Perubahan 2026 Dibahas, Bupati Buton Tengah Dr Azhari Prioritaskan Infrastruktur



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menargetkan pengaspalan dan pembenahan sejumlah ruas jalan utama yang mengalami kerusakan berat dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Target tersebut menjadi salah satu fokus dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Komitmen itu disampaikan Bupati Buton Tengah Dr. Azhari dalam Rapat Paripurna DPRD Buton Tengah dengan agenda penyerahan dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 di Ruang Rapat DPRD Buton Tengah, Rabu (12/8/2026).

Dokumen perubahan anggaran diserahkan pemerintah daerah untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah, Mazaluddin, dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Azhari mengatakan perubahan kebijakan anggaran tidak semata-mata diarahkan untuk menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah juga ingin memastikan alokasi belanja lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

“Perubahan kebijakan anggaran diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan memastikan belanja daerah lebih responsif terhadap kebutuhan mas-

asyarakat,” kata Azhari dalam rapat paripurna tersebut.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah memasukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi sebagai sektor yang mendapat perhatian dalam perubahan APBD 2026.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga berupaya menjaga agar belanja publik menjangkau sektor yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, persoalan infrastruktur jalan menjadi salah satu pekerjaan yang ditekankan dalam pembahasan perubahan anggaran. Kerusakan jalan, terutama pada ruas utama, berpengaruh terhadap mobilitas warga dan kelancaran kegiatan ekonomi antarkawasan.

Karena itu, pemerintah daerah menempatkan percepatan penanganan jalan sebagai target yang harus dikejar pada sisa tahun anggaran. Pengaspalan akan diarahkan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat.

“Perbaikan infrastruktur menjadi salah satu target utama dalam perubahan anggaran tahun ini,” ujar Azhari.

Bupati berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD tidak berlarut-larut. Efektivitas pembahasan diperlukan agar program yang telah ditetapkan sebagai prioritas dapat

segera dilaksanakan pada tahun berjalan.

Secara teknis, dokumen perubahan KUA-PPAS akan didalami melalui rangkaian pembahasan bersama komisi-komisi di DPRD Buton Tengah. Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar perencanaan dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pembahasan perubahan KUA-PPAS diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang akuntabel, terarah, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” kata Azhari.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, KUA dan PPAS merupakan instrumen penting dalam proses penyusunan APBD. KUA memuat kebijakan umum terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sedangkan PPAS menjadi dasar penentuan prioritas program dan batas maksimal anggaran sebelum penyusunan APBD.

Secara historis, mekanisme tersebut berkembang seiring penguatan otonomi daerah setelah era reformasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak penting desentralisasi sebelum kemudian dis-

empurnakan melalui regulasi berikutnya.

Dalam perkembangan pengelolaan keuangan publik secara global, penganggaran daerah juga semakin diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan orientasi hasil. Praktik penganggaran berbasis kinerja di berbagai negara menempatkan manfaat program bagi masyarakat sebagai salah satu ukuran penting dalam menentukan prioritas belanja.

Bagi Buton Tengah, prinsip tersebut tercermin dalam arah perubahan APBD 2026 yang menggaungkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi.

Pemerintah daerah kini memiliki waktu yang terbatas untuk merealisasikan target tersebut. Setelah melalui pembahasan bersama DPRD, perubahan anggaran diharapkan dapat segera menjadi dasar pelaksanaan program prioritas hingga penghujung 2026.

Dengan demikian, agenda paripurna pada 12 Agustus 2026 bukan sekadar tahapan administratif. Penyerahan KUA-PPAS Perubahan menjadi pintu masuk bagi pembahasan kebijakan anggaran yang akan menentukan seberapa cepat pemerintah daerah menangani kebutuhan mendesak masyarakat, terutama perbaikan jalan yang rusak. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Serukan Gotong Royong dan Efisiensi dalam Mengisi Kemerdekaan

BUTON, BP- Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra meminta seluruh elemen daerah menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan, mempercepat pembangunan, dan memastikan keterbatasan anggaran tidak mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton di Ruang Sidang Paripurna DPRD Buton, Pasarwajo, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna digelar untuk menden-garkan pidato Bupati Buton dalam rangka menyambut HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjelang peringatan hari kemerdekaan yang jatuh pada 17 Agustus 2026.

Hadir dalam rapat itu Wakil Bupati Buton Syarifuddin Saafa, ST, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Buton, Sekda Buton La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta sejumlah undangan lainnya.

Alvin mengemukakan kondisi efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program. Menurut dia, keterbatasan fiskal harus dijawab dengan penetapan prioritas yang terukur agar pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.

“Dalam kondisi efisiensi seperti sekarang, kita harus lebih bijak, fokus pada prioritas, dan memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Alvin dalam pidatonya.

Ia menilai pembangunan daerah tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Buton mempertahankan

persatuan dan memperkuat budaya gotong royong. Menurut dia, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya mengisi kemerdekaan dalam konteks pembangunan daerah.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kebersamaan, sinergi dan kolaborasi seluruh komponen daerah agar pembangunan yang kita laksanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membawa Buton menuju masa depan yang lebih baik,” katanya.

Alvin juga menggarisbawahi bahwa pembangunan harus diarahkan pada sejumlah kebutuhan strategis, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Gagasan tersebut menempatkan kemerdekaan bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai tanggung jawab pembangunan yang harus diterjemahkan melalui kebijakan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

“Semangat kemerdekaan harus terus kita hidupkan dalam setiap kerja dan pengabdian. Kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi harus kita isi dengan pembangunan yang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ujar Alvin.

Dalam konteks sejarah nasional, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Proklamasi tersebut menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka setelah melalui perjuangan panjang melawan kolonialisme.

Peringatan kemerdekaan Indonesia juga berlangsung dalam konteks sejarah dunia yang lebih luas. Tahun 1945 menjadi titik penting perubahan tatanan internasional setelah Perang Dunia II berakhir. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk sebagai organisasi internasional yang antara lain bertujuan menjaga perdamaian dan mendorong kerja sama antarnegara.

maian dan mendorong kerja sama antarnegara.

Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi, tantangan mengisi kemerdekaan telah bergeser dari perjuangan mempertahankan kedaulatan menuju upaya meningkatkan kesejahteraan, memperkuat institusi pemerintahan, membangun sumber daya manusia, dan menghadapi perubahan ekonomi global.

Dalam kerangka itu, Ketua DPRD Kabupaten Buton Mararusli Sihaji, SH, menilai rapat paripurna HUT kemerdekaan memiliki makna lebih luas daripada agenda seremonial. Menurut dia, momentum tersebut dapat digunakan untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif.

“Rapat paripurna ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang refleksi bersama bagi kita semua untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan memperkokoh sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Buton yang lebih maju dan sejahtera,” kata Mararusli.

Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hubungan kerja yang konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah juga menjadi penting dalam memastikan agenda pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagi Kabupaten Buton, pesan kemerdekaan dalam rapat paripurna itu pada akhirnya diarahkan pada kerja konkret. Efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kualitas manusia menjadi bagian dari pekerjaan yang harus dijalankan secara bersama.

Pemerintah Kabupaten Buton pun mengajak masyarakat memperingati HUT ke-81 RI dengan memperkuat optimisme dan semangat pengabdian. Kemerdekaan diposisikan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan amanah yang harus diteruskan melalui kerja nyata untuk mewujudkan daerah yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. (La Harman)

HUT ke-81 RI, Gubernur Sultra Kenang Jasa Pahlawan di TMP Watubangga



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Keheningan menyelimuti Taman Makam Pahlawan (TMP) Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saat Apel Kehormatan dan Renungan Suci digelar tepat pada pergantian hari, Senin (17/8/2026) pukul 00.00 WITA. Momentum tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam perjuangan.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka yang hadir dalam kegiatan itu menilai renungan tengah malam memiliki makna khusus. Suasana sunyi di makam pahlawan, menurut dia, memberi ruang untuk merefleksikan kembali perjalanan bangsa sejak kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agus-

tus 1945.

“Renungan suci dilaksanakan malam hari sekaligus untuk memberikan dampak psikologis, karena malam itu kita merefleksikan, merefleksikan tentang 81 tahun yang lalu, di mana pendahulu kita merebut kemerdekaan,” ujar Andi Sumangerukka.

Ia mengatakan, perjuangan merebut kemerdekaan tidak semestinya berhenti sebagai catatan sejarah. Generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk meneruskan semangat tersebut melalui pekerjaan, pengabdian, dan kontribusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya-karya yang ada,” katanya.

Apel yang dipimpin Komandan Korem 143/Halu Oleo Brigjen TNI Raden Wa-

hyu Sugiarto selaku inspektur upacara itu berlangsung khidmat. Rangkaian acara meliputi laporan Komandan Upacara, penghormatan kepada arwah para pahlawan, pembacaan nasakh Apel Kehormatan dan Renungan Suci, mengheningkan cipta, pembacaan doa, serta penghormatan kembali kepada para pahlawan.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Pj. Sekda Sultra Drs. Muhammad Fadlansyah, Danlanal Kendari Kolonel Laut (P) M. Sati Lubis, Danlanud Halu Oleo Kendari Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto, jajaran Forkopimda Sultra, serta personel gabungan TNI, Polri, dan ASN.

Di TMP Watubangga sendiri terdapat 81 makam pahlawan. Sebanyak 68 makam

merupakan pejuang angkatan bersenjata, sedangkan 13 lainnya merupakan pejuang rakyat. Pada penghujung apel, lilin dinyalakan di atas setiap pusara sebagai simbol penghormatan sekaligus pesan bahwa nilai perjuangan para pahlawan tidak boleh padam.

Secara historis, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Perjuangan itu kemudian menghadapi tantangan politik dan militer hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada 1949. Indonesia selanjutnya diterima sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1950, lima tahun setelah proklamasi.

Kemerdekaan Indonesia juga berada dalam arus besar dekolonisasi dunia setelah Perang Dunia II. PBB mencatat, ketika organisasi itu berdiri pada 1945, sekitar 750 juta orang atau hampir sepertiga penduduk dunia hidup di wilayah yang berada di bawah kekuasaan kolonial. Gelombang dekolonisasi kemudian mendorong lebih dari 80 wilayah jajahan menuju kemerdekaan. (*)

Gubernur Andi Sumangerukka Fasilitas Bimbel Gratis bagi 49 Paskibraka Sultra Menuju Akmil



Laporan: Mashuri

SULTREA, BP- Sebanyak 49 anggota Paskibraka Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2026 mendapat peluang melanjutkan langkah ke pendidikan militer setelah Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyiapkan bimbingan belajar (bimbel) gratis bagi mereka yang berminat mengikuti seleksi masuk Akademi Militer (Akmil).

Fasilitas tersebut diberikan setelah para pelajar menyelesaikan tugas pengibaran bendera pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Sultra akan melakukan pendataan dan seleksi terhadap anggota Paskibraka yang memiliki minat serta potensi sebelum mereka mengikuti bimbel secara terpusat.

Rencana itu disampaikan Andi Sumangerukka ketika mengukuhkan 49 anggota Paskibraka Tingkat Provinsi Sultra 2026 di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Sabtu (15/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, gubernur menyatakan telah berkomunikasi dengan pimpinan Akmil mengenai persiapan program pembinaan tersebut.

“Bimbel nanti tidak ada biaya. Semua ditanggung oleh provinsi. Saya akan melakukan sama dengan pemberian beasiswa,” kata Andi.

Dukungan itu tidak hanya diarahkan pada persiapan akademik. Gubernur menilai

pembinaan Paskibraka selama sekitar satu bulan telah membentuk kedisiplinan yang dapat menjadi modal bagi para pelajar dalam menghadapi pendidikan dan seleksi sekolah kedinasan. Ia meminta nilai tersebut tidak berhenti ketika tugas sebagai Paskibraka berakhir.

“Di mana saja kita bekerja dan bertugas, modal paling utama adalah disiplin. Jadikan ini sebagai modal untuk pengabdian berikutnya,” ujarnya.

Sebanyak 49 Paskibraka Sultra tersebut terdiri atas 31 pelajar putra dan 18 pelajar putri. Mereka terpilih melalui proses seleksi terhadap 77 pelajar yang berasal dari 16 kabupaten dan kota di Sultra. Dalam proses pengukuhan, Paresanda Maharani Ersaputry Sarira dari MAN 1 Kendari dipercaya sebagai pemimpin upacara dan mewakili seluruh calon anggota Paskibraka memegang Bendera Merah Putih saat pengucapan Ikrar Putra Indonesia.

Selain Akmil, Pemprov Sultra juga berencana mengupayakan fasilitas serupa bagi pelajar yang berminat mengikuti seleksi Akademi Kepolisian, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Namun, untuk tahap awal, komunikasi yang telah dilakukan secara langsung baru dengan pihak Akmil. Secara historis, pendidikan perwira TNI Angkatan Darat memiliki akar panjang sejak Militaire Academie di Yogyakarta pada 31

Oktober 1945. Akademi Militer Nasional kemudian diresmikan di Magelang pada 11 November 1957 dan menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan perwira TNI AD.

Upaya memperluas akses generasi muda terhadap pendidikan dan pengabdian juga sejalan dengan perhatian masyarakat internasional terhadap peran pemuda. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 12 Agustus sebagai Hari Pemuda Internasional melalui Resolusi 54/120 pada 1999, setelah gagasan tersebut berkembang dalam forum kepemudaan dan konferensi menteri yang bertanggung jawab atas kepemudaan. PBB menempatkan pemuda sebagai kelompok penting dalam pembangunan, perdamaian, dan masa depan masyarakat dunia.

Menjelang pelaksanaan tugas pada 17 Agustus, Andi meminta anggota Paskibraka menjaga kesehatan dan berkonsentrasi menyelesaikan tanggung jawab mereka. Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak memberikan tekanan berlebihan kepada anak. “Tugas pokok kalian menanti pada tanggal 17. Di situlah kebanggaan akan terasa ketika kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik,” katanya. Setelah tugas selesai, pembinaan disiplin dan bimbel diharapkan menjadi jembatan bagi para pelajar tersebut untuk mengejar pendidikan serta cita-cita mereka. (*)

DWP Sultra Padukan Semangat Kemerdekaan dengan Aksi Sosial dan Hidup Sehat Lewat Jalan Santai

Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Semangat memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Tenggara diwujudkan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sultra melalui kegiatan yang memadukan olahraga, pangan lokal, pelayanan kesehatan, dan aksi sosial. Kegiatan yang berlangsung di Pelataran Sekretariat DWP Sultra, Sabtu (15/8/2026), itu diikuti pengurus dan anggota DWP serta jajaran Pemerintah Provinsi Sultra.

Rangkaian kegiatan tidak sekadar diarahkan sebagai perayaan, tetapi juga menjadi ruang memperkuat solidaritas dan kepedulian. Jalan santai, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga bazar kuliner rebusan lokal menjadi bagian dari kegiatan yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Sultra sekaligus Penasihat DWP Sultra Ny. Arinta Andi Sumangerukka, Ketua DWP Sultra Ny. Norma Azasi Fadlansyah, serta Pj. Sekda Sultra Mu-



hammad Fadlansyah dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Dari Sekretariat DWP Sultra, peserta memulai jalan santai dengan iringan marching band atau drumband. Setelah kegiatan tersebut, peserta mengikuti senam bersama. Agenda olahraga itu sekaligus dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antarpengurus dan anggota DWP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Nuansa pelayanan publik kemudian mengemuka melalui pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. DWP Sultra menggandeng RS Bahteramas, RS Jiwa, dan RS Oputa Yi Koo dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sementara bazar makanan

menghadirkan jajanan sehat berupa kuliner rebusan lokal sebagai upaya mengenalkan pangan daerah sekaligus mendorong pola hidup sehat.

Ketua DWP Sultra Ny. Norma Azasi Fadlansyah mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan cara organisasi memaknai kemerdekaan dengan kegiatan yang memberi manfaat. “Kami ingin seluruh anggota DWP dapat terus kompak dan berperan aktif memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Puncak kegiatan ditandai penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Sholawat Nabi dan Lomba Kebersihan Sekretariat. Penghargaan diserahkan oleh Penasihat DWP Sultra bersama Sekretaris Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua Panitia Ny. Hj. Andi Yulia Sukirman menilai kegiatan itu sekaligus menjadi sarana menjaga kebugaran dan membangun kepedulian sosial. “Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh jajaran DWP dapat semakin kompak, sehat, dan terus mempererat silaturahmi,” katanya.

Secara historis, peringatan tahun ini memiliki arti khusus karena Indonesia genap 81 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan Soekarno didampingi Mohammad Hatta di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, pada pukul 10.00. Sejarah DWP sendiri bermula pada 5 Agustus 1974 ketika organisasi tersebut

dibentuk dengan nama Dharma Wanita. Setelah perubahan pada era Reformasi, organisasi itu berkembang menjadi Dharma Wanita Persatuan yang menegaskan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang nonpolitik dan mandiri.

Perjalanan tersebut membuat kegiatan DWP Sultra dalam peringatan HUT ke-

81 RI tidak berhenti pada simbol perayaan. Jalan santai dan senam merepresentasikan kebersamaan, pangan lokal mendorong kesadaran hidup sehat, sedangkan pemeriksaan kesehatan serta donor darah menerjemahkan semangat gotong royong ke dalam aksi yang dapat dirasakan

langsung masyarakat. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini kami maknai tidak hanya dengan semangat memeriahkan kemerdekaan, tetapi juga melalui kegiatan yang mempererat kebersamaan, menjaga kesehatan, serta meningkatkan kepedulian sosial,” kata Norma. (*)

Hari Pramuka ke-65, Bupati Buton Dorong Generasi Muda Mandiri dan Inovatif



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- ” Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., mengajak Gerakan Pramuka memperkuat perannya dalam membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, terampil, dan mandiri. Pesan itu disampaikan saat ia menjadi pembina upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026 di Pelataran Alun-Alun Takawa, Pasarwajo, Jumat (14/8/2026).

Upacara tersebut diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Buton, anggota Gerakan Pramuka, para pembina, serta pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa peringatan Hari Pramuka tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang pembinaan karakter generasi muda.

Alvin menilai nilai-nilai kepramukaan tetap relevan menghadapi perubahan zaman. Disiplin, ket-erampilan, kemandirian, gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan semangat pengabdian dinilai penting untuk membentuk sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

“Dari generasi ke generasi, Gerakan Pramuka telah melahirkan manusia-manusia berkualitas dengan berbagai macam profesi,” kata Alvin dalam amanatnya.

Menurut dia, kontribusi Pramuka tidak berhenti pada kegiatan pendidikan nonfor-

mal dan pembinaan kepemudaan. Gerakan tersebut juga memiliki peluang untuk mendorong generasi muda mengenali sekaligus mengembangkan potensi yang ada di daerah.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Swasembada Pangan.” Tema tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang menempatkan kreativitas dan kemampuan generasi muda sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian masyarakat.

Alvin mengatakan semangat swasembada pangan dapat dikenalkan kepada anggota Pramuka melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan dan potensi daerah. Dengan demikian, nilai kepramukaan dapat diterjemahkan menjadi kegiatan produktif yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Jadilah generasi yang terampil, mandiri, kreatif dan inovatif. Terus berkarya dan berikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan daerah,” pesannya.

Dorongan tersebut sekaligus menempatkan Pramuka sebagai salah satu ruang pendidikan karakter di luar sekolah. Melalui aktivitas organisasi, anggota Pramuka dibiasakan bekerja sama, bertanggung jawab, memecahkan persoalan, serta menjalankan kegiatan secara ter-

encana.

Secara historis, Gerakan Pramuka Indonesia resmi diperkenalkan pada 14 Agustus 1961 melalui peristiwa peleburan berbagai organisasi kepan-dukian ke dalam satu wadah. Tanggal tersebut kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Pramuka. Sebelum penyatuan itu, kegiatan kepanduan di Indonesia telah berkembang sejak masa sebelum kemerdekaan dan menjadi salah satu bagian dari sejarah pendidikan kepemudaan.

Secara internasional, gerakan kepanduan berakar dari gerakan yang dipelopori Robert Baden-Powell di Inggris pada awal abad ke-20. Perkemahan percobaan di Brownsea Island pada 1907 kerap dicatat sebagai salah satu tonggak awal gerakan kepanduan dunia. Perkembangannya kemudian meluas ke berbagai negara dan menjadi gerakan pendidikan kaum muda berskala global.

Dalam konteks Kabupaten Buton, momentum Hari Pramuka ke-65 juga dihadiri Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, S.T., Kapolres Buton, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Dr. La Subu, S.H., M.H., Sekda Buton La Ode Syamsuddin, S.Pd., M.Si., para kepala organisasi perangkat daerah, serta kepala sekolah SD, SMP, dan SMA

se-Kabupaten Buton.

Kehadiran unsur pemerintah, pendidikan, dan kepan-dukian dalam upacara tersebut memperkuat pesan bahwa pembentukan generasi muda membutuhkan dukungan lintas sektor. Pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman berorganisasi dan pengabdian di tengah masyarakat.

Alvin berharap anggota Gerakan Pramuka di Kabupaten Buton mampu menjadikan nilai-nilai kepramukaan sebagai bekal menghadapi perubahan sosial dan tantangan pembangunan. Ia mendorong mereka terus belajar, berkarya, berinovasi, serta mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Gerakan Pramuka harus terus menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang tangguh dan mampu memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Takawa akhirnya tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Momentum tersebut diarahkan untuk memperkuat kembali semangat kebersamaan, pengabdian, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menyiapkan generasi muda Buton agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan dan ketahanan pangan.(*)

Bupati Azhari Tawarkan Buton Tengah sebagai Percontohan Transmarine Nasional

BUTON TENGAH, BP- Gagasan mengubah kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan mengemuka dalam webinar yang digelar Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama) Bidang 4, Minggu malam, 9 Agustus 2026. Melalui konsep Transmarine, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, ditawarkan sebagai salah satu model pengembangan kawasan pesisir yang mengintegrasikan potensi laut, pemberdayaan masyarakat, investasi, serta hilirisasi.

Konsep tersebut dibahas dalam webinar bertajuk “Transmarine Reinventing Transmigration: Dari Kawasan Transmigrasi Menuju Mesin Pertumbuhan Ekonomi Biru Indonesia”. Forum yang diikuti alumni UGM dan masyarakat umum itu menghadirkan Prof. Anwar Sanusi, Ph.D. sebagai keynote speaker, serta Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dr. Sigit Mustofa Nurudin, Guru Besar UGM Prof. Dr. Suratman Worosuprojo, dan Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari sebagai narasumber.

Dalam forum tersebut, Bupati Azhari memaparkan potensi kawasan Mawasangka dan Teluk Lasongko sebagai basis pengembangan Transmarine. Dua kawasan itu dinilai memiliki sumber daya kelautan yang dapat dikembangkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi, tetapi juga membentuk rantai ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir.

Menurut Azhari, pengembangan Transmarine diarahkan pada pembentukan ekosistem ekonomi maritim yang bertumpu pada kekuatan masyarakat setempat. Pendekatan tersebut menggabungkan produksi, pengolahan, pemasaran, investasi, serta keberlanjutan sumber daya laut dalam satu mata rantai ekonomi.

“Transmarine harus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi maritim berbasis masyarakat, sehingga potensi kelautan tidak berhenti pada produksi, tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Azhari dalam paparannya.

Komoditas yang menjadi perhatian dalam pengembangan tersebut cukup beragam. Selain perikanan tangkap, Buton Tengah memiliki peluang pada budidaya lobster, udang vaname, rumput laut, rajungan, dan berbagai komoditas laut lainnya yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik kawasan pesisir.

Data produksi 2021- 2025 yang dipaparkan dalam webinar menunjukkan sektor kelautan Buton Tengah telah memiliki basis produksi yang dapat menjadi modal awal pengembangan kawasan. Data tersebut menjadi pijakan untuk mendorong transformasi dari kegiatan ekonomi berbasis komoditas mentah menuju sistem produksi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Salah satu strategi yang didorong adalah hilirisasi. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah membuka peluang pemanfaatan hasil dan bahkan limbah komoditas kelautan untuk menghasilkan produk turunan. Cangkang rajungan, misalnya, diarahkan agar tidak sekadar menjadi limbah, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan melalui pengolahan lebih lanjut.

“Hilirisasi komoditas kelautan harus diperkuat agar rantai nilai ekonomi tetap tumbuh di daerah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Azhari.

Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan investor untuk memperkuat rantai pasok sektor kelautan. Kolaborasi

tersebut diharapkan dapat memper-temukan potensi produksi masyarakat dengan kebutuhan industri, teknologi pengolahan, akses pembiayaan, serta pasar yang lebih luas.

Model itu sekaligus menempatkan masyarakat pesisir bukan semata-mata sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai pelaku utama dalam ekosistem ekonomi biru. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan investor diposisikan sebagai unsur yang saling melengkapi dalam mengembangkan kawasan.

Gagasan tersebut menandai perubahan pendekatan terhadap konsep transmigrasi yang selama ini identik dengan perpindahan dan penempatan penduduk. Dalam paradigma Transmarine, kawasan transmigrasi diarahkan menjadi ruang pengembangan ekonomi yang menyesuaikan karakter geografis dan sumber daya unggulan daerah.

Secara historis, program transmigrasi di Indonesia berkembang dari kebijakan kolonisasi pada masa Hindia Belanda dan kemudian diteruskan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Pada perkembangannya, transmigrasi tidak hanya diarahkan untuk pemerataan persebaran penduduk, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan wilayah dan pembukaan pusat-pusat ekonomi baru.

Perubahan orientasi tersebut semakin relevan ketika pembangunan kawasan mulai menempatkan keberlanjutan lingkungan dan kekuatan ekonomi lokal sebagai bagian penting dari perencanaan. Di tingkat global, gagasan ekonomi biru memperoleh perhatian luas setelah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan Rio+20 pada 2012, ketika pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan semakin dipandang sebagai bagian dari agenda pembangunan.

Dalam konteks itu, konsep Transmarine yang dibahas PP Kagama berupaya mempertemukan pengalaman pembangunan kawasan dengan peluang ekonomi biru. Kawasan pesisir tidak hanya dilihat berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga berdasarkan kemampuan menghasilkan nilai ekonomi dari sumber daya laut tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem.

Azhari menempatkan Buton Tengah, khususnya Mawasangka dan Teluk Lasongko, sebagai ruang yang dapat menguji pendekatan tersebut. Potensi perikanan dan budidaya yang sudah berkembang menjadi fondasi untuk membangun sistem ekonomi yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Jika dikembangkan secara konsisten, model tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat posisi Buton Tengah dalam peta ekonomi maritim. Pada saat yang sama, pengembangan berbasis ekonomi biru diharapkan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk kepentingan generasi mendatang.

“Harapannya, Buton Tengah dapat menjadi model pengembangan kawasan transmigrasi berbasis ekonomi biru yang mampu menghubungkan potensi masyarakat, investasi, hilirisasi, dan keberlanjutan,” kata Azhari.

Webinar PP Kagama itu pada akhirnya tidak sekadar membicarakan perubahan istilah dari transmigrasi menjadi Transmarine. Forum tersebut memperluas gagasan bahwa pembangunan kawasan harus berangkat dari karakter wilayah dan kekuatan ekonomi masyarakatnya. Bagi Buton Tengah, laut menjadi modal utama yang hendak diubah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan pendekatan tersebut, Transmarine diharapkan dapat berkembang sebagai model pembangunan kawasan yang tidak hanya memindahkan pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga membangun ekosistem produksi, pengolahan, investasi, dan pasar secara berkelanjutan. Buton Tengah pun didorong menjadi salah satu contoh bagaimana kawasan pesisir dapat mengambil peran lebih besar dalam agenda ekonomi biru Indonesia. (Ardi)

Siswi SMAN 2 Ayudya Yusuf Terpilih
Jadi Duta Muda BPJS Kesehatan
Baubau Tahun 2026



Laporan: Firman
BAUBAU, BP- Ayudya Rahmadani Yusuf, siswi SMAN 2 Baubau, terpilih sebagai Juara I Pemilihan Duta Muda BPJS Kesehatan Kantor Cabang Baubau Tahun 2026 setelah menungguli 15 pelajar lainnya dalam rangkaian seleksi yang berlangsung Jumat (7/8/2026).

Ayudya dinilai mampu memadukan kreativitas, kemampuan komunikasi, kejelasan pesan, penampilan, serta efektivitas kampanye mengenai Program Jaminan Nasional (JKN). Pada tahap awal, 16 peserta dari sejumlah sekolah di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Baubau mengikuti kampanye video bertema “Generasi Muda Peduli JKN”, yang menjadi salah satu komponen penilaian.

Dari proses tersebut, tiga peserta melaju ke babak final, yakni Ayudya Rahmadani Yusuf dari SMAN 2 Baubau, Rahma Auliyah dari SMAN 4 Wangi-wangi, dan Rannan Halwah Linazharin Gani dari SMAN 1 Baubau. Ketiganya kemudi-

an mempresentasikan gagasan, komitmen, dan rencana kontribusi apabila dipercaya menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Baubau Sarman Pali padang mengatakan keterlibatan pelajar dalam program tersebut diarahkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai JKN melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan generasi muda. “Kami berharap Duta Muda BPJS Kesehatan tidak hanya menjadi sebuah gelar, tetapi menjadi peran yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Sarman kepada Baubau Post, Selasa (11/8/2026).

Menurut Sarman, perkembangan teknologi dan media sosial membuat generasi muda memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi. Kemampuan mereka berkomunikasi secara kreatif dinilai dapat membantu menjelaskan manfaat dan pentingnya jaminan kesehatan kepada teman sebaya maupun masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.

Terpilihnya Ayudya juga melanjutkan es-

tafet Duta Muda BPJS Kesehatan Kantor Cabang Baubau. Pada 2025, gelar tersebut diemban Arlia Triyani Putri dari SMAN 2 Baubau. Dalam pemilihan tahun ini, Rahma Auliyah meraih Juara II, sedangkan Rannan Halwah Linazharin Gani menempati Juara III.

Ayudya mengatakan kemenangan tersebut bukan sekadar hasil sebuah kompetisi, melainkan tanggung jawab untuk membantu meningkatkan literasi kesehatan di kalangan generasi muda. “Bagi saya, menjadi Duta Muda bukan hanya tentang memenangkan kompetisi, tetapi tentang bagaimana saya dapat mengajak teman-teman dan generasi muda untuk lebih mengenal, memahami, dan peduli terhadap Program JKN,” ujarnya.

Komitmen itu akan diwujudkan Ayudya melalui pemanfaatan kreativitas dan kemampuan komunikasi untuk menyampaikan informasi JKN secara menarik dan mudah dipahami. Sebagai

Juara I, ia selanjutnya akan mewakili BPJS Kesehatan Kantor Cabang Baubau pada Pemilihan Duta Muda tingkat Kedeputan Wilayah IX.

Program tersebut sekaligus menempatkan edukasi generasi muda dalam konteks yang lebih luas. JKN mulai beroperasi secara nasional pada 1 Januari 2014 setelah BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011; saat peluncuran, pemerintah menyebut sedikitnya 121 juta jiwa menjadi peserta awal. Di tingkat global, gagasan perluasan akses kesehatan kemudian menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Target 3.8 tentang universal health coverage yang diadopsi negara-negara anggota PBB pada 2015. Karena itu, keterlibatan pelajar sebagai penyambung informasi JKN tidak hanya berkaitan dengan kompetisi, tetapi juga dengan upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai perlindungan kesehatan. (*)

Deteksi Dini Penyakit Kronis, Kemenkes
Sasar 235 Pegawai Bakom RI



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) ke lingkungan perkantoran untuk memperkuat deteksi dini penyakit kronis. Sebanyak 235 pegawai Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Perluasan CKG menasar kelompok pekerja yang menghadapi ritme kerja tinggi, tingkat stres, serta mobilitas yang padat. Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, dan Puskesmas Kecamatan Gambir.

Data Kemenkes hingga akhir Juli 2026 menunjukkan 73,8 juta penduduk telah memanfaatkan CKG, setelah pada 2025 jumlah peserta mencapai 70,3 juta orang. Pemerintah menargetkan layanan pemeriksaan gratis itu menjangkau 130 juta penduduk atau sekitar 46 persen populasi pada akhir 2026.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pemeriksaan di tempat kerja diperlukan agar gangguan kesehatan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. “Pegawai yang sehat adalah modal utama sebuah institusi. Lewat CKG, kita ingin memastikan ti-

dak ada penyakit yang ditemukan saat kondisi sudah parah. Deteksi dini itu murah, bahkan gratis. Yang mahal itu jika terlambat tahu,” ujarnya.

Sebanyak 157 peserta CKG di Bakom RI merupakan tenaga profesional, 31 ASN, dan 47 tenaga sosial. Berdasarkan jenis kelamin, peserta terdiri atas 168 laki-laki dan 67 perempuan. Pemeriksaan mencakup pengukuran status gizi, tekanan darah, gula darah, mata, telinga, gigi dan mulut, serta skrining tuberkulosis (TBC) dan penyakit kulit. Peserta perempuan juga memperoleh layanan SADANIS dan IVA untuk mendukung deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menilai program tersebut relevan dengan karakter pekerjaan komunikasi pemerintah yang menuntut jam kerja panjang dan mobilitas tinggi. “CKG ini bentuk kepedulian lembaga terhadap aset paling berharga, yaitu para pegawai,” kata Qodari. Bakom RI juga mendukung kampanye CKG melalui produksi Iklan Layanan Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik.

Urgensi pemeriksaan berkala semakin terlihat dari hasil CKG. Kemenkes mencatat lebih dari 6 juta orang dewasa dan 693 ribu anak mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Temuan itu memperlihatkan penyakit tidak menular tidak lagi hanya menja-

di persoalan kelompok usia lanjut, tetapi juga mulai menyentuh usia produktif dan anak-anak.

Upaya preventif tersebut sejalan dengan perubahan paradigma kesehatan nasional dari pendekatan kuratif menuju pencegahan dan prediksi risiko. “Arah pembangunan kesehatan kita ubah dari kuratif menjadi preventif dan prediktif, mencegah sejak awal,” ujar Kunta. Secara historis, pengendalian penyakit tidak menular juga menjadi agenda global sejak Organisasi Kesehatan Dunia mendorong negara-negara memperkuat pencegahan penyakit kronis melalui berbagai strategi kesehatan masyarakat, termasuk deteksi dini dan pengendalian faktor risiko.

Kemenkes menyebut masih terdapat hambatan psikologis dalam mengikuti CKG. Survei Kemenkes dan Omnibus Nielsen Kuartal II 2026 menunjukkan sebagian warga takut mengetahui penyakit yang diderita, merasa masih sehat, atau tidak memiliki cukup waktu untuk menjalani pemeriksaan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, hasil CKG dapat ditindaklanjuti melalui layanan Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas dan terintegrasi secara digital melalui SATUSEHAT. Dengan mekanisme itu, pemeriksaan gratis diharapkan tidak berhenti pada penemuan risiko, tetapi berlanjut pada penanganan dan pemantauan kesehatan. (*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Ravana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Kericuhan di Hari Damai Aceh, Yusril Dorong Semua Pihak Menahan Diri



Yusril mengatakan pemerintah menghormati seluruh elemen masyarakat Aceh yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan: Firman

JAKARTA, BP- Pemerintah meminta seluruh elemen masyarakat Aceh menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif setelah kericuhan mewarnai peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh, Sabtu (15/8). Imbauan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemas-yarakatan Yusril Ihza Mahendra di tengah pembahasan sejumlah persoalan strategis Aceh, termasuk revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh.

Yusril mengatakan pemerintah menghormati seluruh elemen masyarakat Aceh yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut dia, penyelesaian berbagai persoalan di Aceh membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar stabilitas serta perdamaian yang telah terbangun tetap terjaga.

“Mudah-mudahan

han suasana di Aceh sudah kondusif dan semua pihak menjaga ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian,” kata Yusril di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Kericuhan terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman saat zikir dan doa bersama memperingati Hari Damai Aceh ke-21. Peristiwa bermula ketika massa mengibarkan bendera bulan bintang di tiang utama masjid meski aparat sebelumnya meminta agar bendera tersebut tidak dikibarkan. Ketegangan kemudian berkembang menjadi aksi saling lempar hingga polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata.

Polda Aceh menyatakan kondisi telah kembali terkendali dan kondusif. Personel gabungan masih disiagakan di sekitar lokasi, sementara patroli ditingkatkan di sejumlah wilayah Aceh untuk mengantisipasi gangguan keamanan sekaligus memastikan

aktivitas masyarakat berlangsung normal.

Di tengah upaya menjaga stabilitas tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembahasan mengenai keberlanjutan regulasi khusus Aceh. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkannya berkoordinasi dengan DPR terkait revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang akan berakhir pada 2027. Pemerintah berharap pembahasan revisi regulasi tersebut dapat diselesaikan tahun ini.

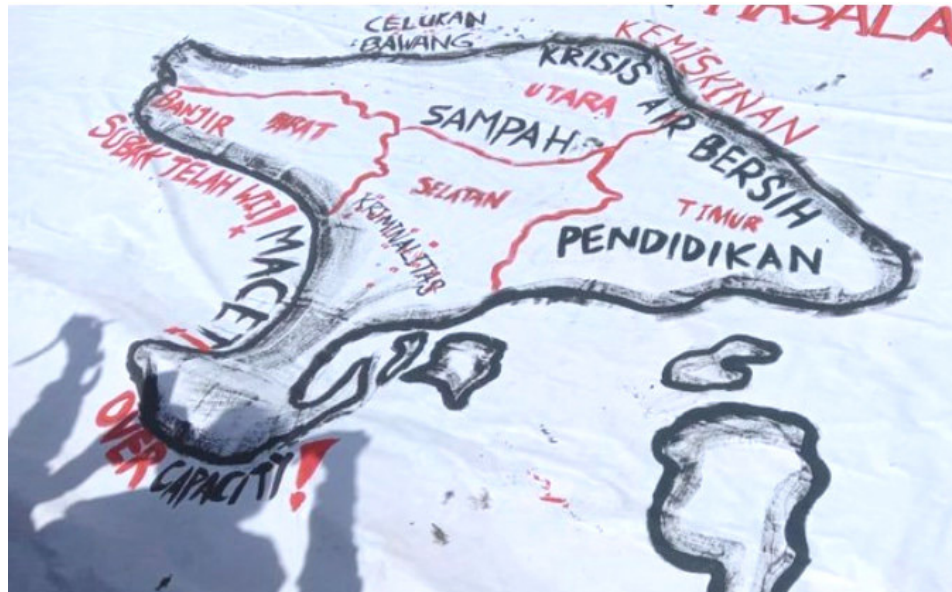
Pemerintah Aceh dan DPR Aceh pun sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai kepastian hukum penggunaan Bendera Bulan Bintang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh setelah kericuhan pada Sabtu (15/8). “Kita menghormati semua elemen masyarakat

Aceh yang sama-sama mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Yusril.

Secara historis, perdamaian Aceh memiliki tonggak penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kesepakatan yang difasilitasi mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari melalui Crisis Management Initiative itu mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks internasional, proses perdamaian Aceh kerap dipandang sebagai contoh penyelesaian konflik melalui perundingan, terutama setelah bencana tsunami 2004 memperkuat dorongan untuk mengakhiri konflik dan membangun kembali Aceh.

Yusril menilai perjalanan perdamaian tersebut harus menjadi pijakan bagi semua pihak untuk menyelesaikan persoalan Aceh melalui jalur dialog dan kerja sama. “Kita akan bekerja bersama-sama mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat di dalam masyarakat yang menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki keadaan,” katanya. (*)

Imigrasi Deportasi WNA Kelahiran Israel yang Kelola Jasa Visa Bali



Laporan: Hadi

BALI, BP- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mendeportasi seorang warga negara Lithuania berinisial BR setelah menemukan dugaan penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan aktivitas berbayar sebagai pembuat konten dan pemasaran digital. BR juga ditengarai terkait dengan agen perjalanan The Bali Dream yang menawarkan jasa perencanaan perjalanan, bulan madu, hingga pengurusan visa bagi pemegang paspor Israel.

Penindakan terhadap BR dilakukan setelah informasi mengenai aktivitas warga negara asing tersebut beredar luas di media sosial. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri mengatakan pihaknya melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap informasi tersebut menggunakan data keimigrasian, termasuk menelusuri keterkaitan BR dengan situs thebalidream.com dan nomor WhatsApp bisnis yang digunakan.

“Setiap informasi terkait aktivitas orang asing yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novyandri dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8) malam.

Sebelumnya, ung-

gahan akun Instagram @aelexav menyinggung dugaan keterlibatan dua mantan anggota militer Israel dalam pengelolaan agen perjalanan di Bali. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Ngurah Rai kemudian melakukan pemeriksaan. Berdasarkan sistem pengenalan wajah, dua sosok yang disebut dalam unggahan itu teridentifikasi sebagai SG (30) dan AC (28), pemegang paspor Jerman yang keduanya lahir di Israel. Namun, hasil penelusuran menunjukkan SG dan AC telah meninggal Indonesia pada 11 Agustus 2025.

Penyelidikan selanjutnya diarahkan kepada The Bali Dream. Dari pemeriksaan, situs dan nomor WhatsApp bisnis tersebut dikaitkan dengan BR. Data keimigrasian mencatat BR masuk ke Indonesia pada 7 Mei 2026 menggunakan visa kunjungan bisnis. Imigrasi menemukan izin tersebut digunakan untuk aktivitas lain, yakni menjadi pembuat konten berbayar dan menjalankan pemasaran digital.

Atas pelanggaran tersebut, BR dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan selama lima tahun sejak 13 Agustus 2026, yang dapat diperpanjang sesuai ketentuan. BR dipulangkan melalui penerbangan TG32

dari Denpasar menuju Bangkok, kemudian melanjutkan perjalanan ke Frankfurt dan Vilnius. Hingga penyelidikan selesai, Imigrasi tidak menemukan kantor atau tempat usaha fisik The Bali Dream di wilayah Indonesia.

Kasus tersebut berlangsung dalam konteks kebijakan keimigrasian Indonesia yang sejak lama menerapkan pengawasan khusus terhadap warga negara dari sejumlah negara, termasuk Israel. Hingga 2026, Israel tercatat dalam daftar negara yang warga negaranya memerlukan calling visa atau persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi sebelum visa diterbitkan. Secara historis, Indonesia juga belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan tetap mengaitkan perubahan kebijakan tersebut dengan penyelesaian konflik Palestina-Israel serta pembentukan negara Palestina.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan pengawasan terhadap warga negara asing merupakan bagian dari upaya menjaga Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan kondusif. “Orang asing yang datang ke Indonesia tentu kami sambut dengan baik, tetapi setiap orang asing juga wajib menghormati hukum dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (*)

Bareskrim Bongkar Sindikat Emas Ilegal, Dua WN India Ditangkap

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Bareskrim Polri membongkar dugaan jaringan penyelundupan emas ilegal dari Indonesia menuju Dubai yang melibatkan dua warga negara (WN) India. Dalam penyelidikan awal, jaringan tersebut diperkirakan mampu mengolah sekitar 30 kilogram material emas per hari dan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp3 triliun dalam sebulan.

Dua WN India itu ditangkap penyidik di dua apartemen berbeda di Jakarta Utara pada Minggu (16/8)

dini hari. Penggeledahan di lokasi pertama menemukan dua batang emas dengan berat masing-masing sekitar satu kilogram serta emas berbentuk cincin sekitar setengah kilogram. Di lokasi kedua, polisi menemukan tempat yang diduga digunakan untuk mengolah emas sebelum dikirim ke luar negeri.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni mengatakan, kedua tersangka diduga baru sekitar dua bulan berada di Indonesia. Mereka masuk menggunakan paspor untuk kepentingan

investor maupun perdagangan. Polisi kini menelusuri pihak-pihak yang memasok material, mengolah, hingga mengirim emas tersebut ke luar negeri.

“Bisa dibayangkan 30 kilogram itu kali 30 hari, kurang lebih satu ton. Kalau satu gram itu harganya Rp2,6 juta, hampir Rp3 triliun yang diselundupkan ke luar negeri tanpa kita ketahui,” kata Irhamni kepada wartawan, Minggu (16/8).

Dari apartemen kedua, penyidik turut menemukan 18 keping logam putih dengan berat sekitar 18 kilogram. Material tersebut diduga merupakan residu dari proses pengolahan emas. Polisi

juga menyita uang tunai dalam rupiah dan dolar Amerika Serikat serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mengolah emas.

“Ini residunya, mendekati silver. Residu dari pengolahan emas. Ada 18 keping, kurang lebih 18 kilogram. Berarti emas murninya yang sudah diselundupkan mungkin berapa puluh kali lipat, mungkin sepuluh kali lipat yang ada. Ini hanya residunya,” ujar Irhamni.

Polisi menduga aktivitas pengolahan dan penyelundupan tersebut telah berlangsung sekitar dua bulan. Penyelidikan diarah-

kan untuk mengungkap sumber material emas, jalur distribusi, serta negara tujuan. Irhamni mengatakan penindakan akan dilakukan terhadap seluruh mata rantai, mulai dari aktivitas penambangan hingga jaringan yang membawa hasilnya ke luar negeri.

Kasus tersebut berlangsung di tengah pengetatan pemerintah terhadap pertambangan tanpa izin. Kementerian ESDM pada 2024, misaln-

ya, menangani perkara tambang bijih emas tanpa izin di Ketapang, Kalimantan Barat, sementara pada Juni 2026 penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan emas ilegal di Gunung Botak, Maluku, kembali dilakukan. Dalam salah satu perkara Gunung Botak, puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyelundupan emas juga bukan persoalan baru dalam perdagangan internasi-

onal. Dubai secara historis merupakan salah satu pusat perdagangan emas dunia dan pernah menjadi jalur perdagangan emas ke India ketika impor emas India dibatasi pada dekade 1960-an. Dalam perkembangan modern, otoritas Dubai masih beberapa kali menggagalkan penyelundupan emas, termasuk penyitaan emas batangan seberat 3 kilogram pada 2021 dan 2,3 kilogram pada 2022. (*)

Dari Lahan Terbengkalai, DWP DPRD Baubau Sulap Lahan Kosong Menjadi Kebun Bumbu Produktif



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Lahan yang sebelumnya gersang dan tidak terkelola di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Baubau kini ditata menjadi kebun produktif melalui program Kedai Parlemen. Inisiatif Darma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong pemanfaatan ruang kosong menjadi lahan hijau yang bernilai ekonomi dan edukatif.

Program itu dikembangkan dengan menanam sejumlah tanaman bumbu dapur, antara lain tomat, cabai, dan serai. Hasilnya direncanakan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehingga sebagian kebutuhan yang sebel-

umnya dibeli di pasar dapat dipenuhi dari lingkungan sendiri.

Sekretaris DPRD Kota Baubau, Yaya Wirayahman, mengatakan Kedai Parlemen tidak dirancang sekadar sebagai ruang penghijauan. Program tersebut juga diharapkan menjadi contoh bagi keluarga besar Sekretariat DPRD dalam mengelola lingkungan secara produktif dan berwawasan ekologis.

“Dengan hadirnya Kedai Parlemen ini, kami berharap dapat memotivasi jajaran Darma Wanita Persatuan dan keluarga besar Sekretariat DPRD untuk mengelola lingkungan yang asri, berwawasan lingkungan dan bermanfaat,” ujar Yaya kepada awak media, Jumat (14/8/2026).

Menurut Yaya, pe-

manfaat lahan sederhana seperti itu dapat memberikan efisiensi bagi keluarga. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan berkebun juga membuka ruang bagi anggota DWP untuk terlibat dalam aktivitas produktif yang dapat dilakukan dari lingkungan kantor maupun rumah.

Kedai Parlemen merupakan bagian dari gerakan DWP di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengembangkan tanaman bumbu dapur. Program tersebut menempatkan pemanfaatan lahan kosong sebagai salah satu kegiatan produktif ibu-ibu DWP.

Gagasan serupa bukan hal baru dalam agenda ketahanan

pangan. Kementerian Pertanian sebelumnya mengembangkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), yang mengoptimalkan lahan pekarangan dan ruang terbuka untuk meningkatkan ketersediaan serta akses pangan keluarga. Dalam pelaksanaannya, P2L juga menyasar wilayah perkotaan dan kelompok masyarakat, termasuk kelompok wanita tani dan PKK.

Secara global, pertanian perkotaan telah lama dipandang sebagai salah satu bagian dari sistem pangan kota. FAO mencatat sekitar 800 juta orang di dunia terlibat dalam aktivitas pertanian perkotaan pada data yang dihimpun sebelumnya. FAO juga menilai pertanian perkotaan dapat memperkuat ketahanan pangan, menyediakan pangan segar lebih dekat dengan konsumen, sekaligus memberi manfaat ekonomi dan lingkungan.

Karena itu, Yaya berharap Kedai Parlemen tidak berhenti sebagai proyek internal Sekretariat DPRD, tetapi berkembang menjadi inspirasi bagi OPD, keluarga, dan masyarakat Baubau untuk mengubah lahan tidak produktif menjadi ruang hijau yang menghasilkan. Harapannya bisa memberi inspirasi dan motivasi bagi yang lain,” katanya. (*)

GJI HUT RI ke-81, Barisan Pramuka Kota Baubau Tampil Penuh Semangat

Pewarta: Firman

BAUBAU, BP-Gerakan Pramuka menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah (GJI) untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau. Peserta dari jenjang SD hingga SMK turun dalam barisan seragam Pramuka, Selasa (11/8/2026), sekaligus memperlihatkan keberlanjutan pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan.

Wakil Wali Kota Baubau sekaligus Ketua Gerakan Pramuka Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, mengatakan keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Pramuka masih memiliki posisi penting dalam pendidikan karakter. Menurut dia, kegiatan kepramukaan memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar disiplin, mandiri, bekerja sama, dan bertanggung jawab.

“Gerakan Pramuka ini merupakan salah satu wadah untuk membentuk karakter anak-anak kita. Di dalamnya ada kedisiplinan, kemandirian, kekompakan dan rasa tanggung jawab,” ujar Hamsinah kepada Baubau Post di Rujab Wali Kota Baubau, Selasa (11/8/2026).

Keterlibatan hampir seluruh satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas juga dinilai menjadi gambaran soliditas Gerakan Pramuka di Baubau. Barisan peserta memenuhi ruas



Wakil Wali Kota Baubau sekaligus Ketua Gerakan Pramuka Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu

jalan dalam rangkaian GJI yang digelar sebagai bagian dari peringatan kemerdekaan, dengan menampilkan kekompakan dan kedisiplinan masing-masing kelompok.

“Anak-anak kita dari SD, SMP, SMA dan SMK semuanya tampil. Ini menunjukkan bahwa Pramuka di Kota Baubau sangat solid,” katanya.

Secara historis, Gerakan Pramuka Indonesia secara resmi diperkenalkan pada 14 Agustus 1961, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Gerakan kepanduan dunia sendiri telah berkembang sejak perkemahan eksperimental Robert Baden-Powell di Pulau Brownsea, Inggris, pada 1907. Perkembangan tersebut menjadikan kepanduan sebagai gerakan pendidikan nonformal yang menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks peringatan HUT RI ke-81, Hamsinah menilai kegiatan Pramuka perlu ditempatkan lebih jauh dari sekadar agenda seremonial. Aktivitas yang melibatkan pe-

lajar secara langsung dinilai dapat menjadi sarana menumbuhkan semangat kebangsaan sekaligus membangun karakter sejak dini.

“Pramuka jangan hanya dilihat sebagai kegiatan seremonial. Ini adalah wadah untuk membangun karakter generasi muda dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.

Selain GJI, agenda kepramukaan juga berlanjut pada apel nasional yang tahun ini mengalami penyusunan jadwal. Apel yang biasanya diperingati setiap 14 Agustus tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus dan dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hamsinah menyatakan akan berangkat menghadiri agenda tersebut sebagai bagian dari komitmen mendukung Gerakan Pramuka. Apel itu melibatkan unsur Kwarda, Kwarcab, Mabicab serta kepala daerah dari tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota. (*)

137 Barisan Pramuka dan Karang Taruna Ramaikan Gerak Jalan Indah HUT RI di Baubau Pada Hari Pertama

Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Sedikitnya 475 barisan dari berbagai elemen masyarakat akan meramaikan Gerak Jalan Indah (GJI) dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau. Parade yang berlangsung selama tiga hari, 11-13 Agustus 2026, itu menjadi salah satu rangkaian perayaan kemerdekaan yang melibatkan pelajar, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan.

Partisipasi terbesar diperkirakan terjadi pada Rabu (12/8/2026), ketika 196 barisan pelajar dijadwalkan tampil menggunakan seragam sekolah masing-masing. Jumlah tersebut menunjukkan kuatnya keterlibatan kalangan pendidikan dalam me-



meriahkan momentum kemerdekaan sekaligus memperkenalkan semangat kebangsaan kepada generasi muda.

Sehari sebelumnya, Selasa (11/8/2026), sebanyak 137 barisan akan membuka rangkaian GJI. Peserta terdiri atas 86 barisan Pramuka, 44 barisan Karang Taruna, dan tujuh March-

ing Band. Kehadiran kelompok-kelompok tersebut akan mengawali parade yang berlangsung di ruas-ruas jalan Kota Baubau.

Pada hari terakhir, Kamis (13/8/2026), giliran peserta dari beragam unsur masyarakat dan pemerintahan mengambil bagian. Data sementara panitia mencatat 142

barisan, terdiri atas 80 barisan kategori aksesori, 12 barisan mahasiswa dan alumni, 12 barisan organisasi, serta 38 barisan dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, BUMD, BUMN, dan instansi vertikal.

Panitia belum menetapkan angka final peserta untuk hari

ketiga. Verifikasi masih dilakukan, khususnya terhadap data dari OPD, kecamatan, BUMD, BUMN, dan instansi vertikal. Dengan demikian, jumlah 142 barisan tersebut masih dapat bertambah ataupun mengalami perubahan setelah proses pendataan selesai.

“Data peserta masih kami verifikasi agar seluruh barisan yang tampil sesuai dengan kategori dan urutan yang telah ditetapkan,” demikian gambaran persiapan panitia sebagaimana tercermin dari proses finalisasi peserta menjelang pelaksanaan.

Jika angka sementara tersebut tidak berubah, total peserta selama tiga hari mencapai sedikitnya 475 barisan. Skala partisipasi itu memperlihatkan

kan bahwa perayaan kemerdekaan di Baubau tidak hanya menjadi agenda seremonial pemerintah, tetapi juga ruang partisipasi publik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Secara historis, perayaan kemerdekaan Indonesia berpijak pada Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Delapan puluh satu tahun kemudian, berbagai bentuk perayaan di daerah, termasuk parade dan gerak jalan, menjadi sarana memperbarui ingatan kolektif tentang kemerdekaan. Dalam konteks global, tahun 1945 juga menjadi titik penting bagi kerja sama internasional setelah Perang Dunia II. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

dibentuk melalui Piagam yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 dan mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, memperlihatkan kuatnya semangat membangun tatanan dunia melalui kerja sama setelah konflik besar.

Di Baubau, semangat tersebut diterjemahkan melalui keterlibatan lintas kelompok dalam GJI. Panitia kini memantapkan urutan barisan dan kesiapan teknis di lapangan agar parade berjalan tertib dan lancar. “GJI diharapkan bukan sekadar tontonan, tetapi menjadi ruang memperkuat kebersamaan dan semangat nasionalisme masyarakat,” menjadi pesan utama yang ingin dihadirkan dalam rangkaian kegiatan tersebut. (*)